



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa agar pemanfaatan Belanja Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.164.627.000,00 terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp 776.161.000,00 |
| b. Belanja Langsung sebesar | Rp1.388.466.000,00 |

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp776.161.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

- | | |
|---|------------------|
| a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar | Rp176.161.000,00 |
| b. Belanja Penunjang Operasional sebesar | Rp600.000.000,00 |

Pasal 4

Anggaran Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp176.161.000,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- | | |
|---|------------------|
| a. Gaji Pokok/Uang Representasi sebesar | Rp 58.764.000,00 |
| b. Tunjangan Keluarga sebesar | Rp 8.227.000,00 |
| c. Tunjangan Jabatan sebesar | Rp 98.280.000,00 |
| d. Tunjangan Beras sebesar | Rp 7.127.000,00 |
| e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar | Rp 1.537.000,00 |
| f. Pembulatan Gaji sebesar | Rp 20.000,00 |
| g. Tunjangan BPJS Kesehatan sebesar | Rp 1.723.000,00 |
| h. Iuran Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian (JKK JK) sebesar | Rp 483.000,00 |

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp600.000.000,00 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 atau sebesar Rp360.000.000,00.
 - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,00 atau sebesar Rp240.000.000,00.
- (2) Belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp1.388.466.000,00 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Rp 36.000.000,00 |
| b. Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp 216.000.000,00 |
| c. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | Rp 628.400.000,00 |
| d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Rp 382.216.000,00 |
| e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | Rp 95.850.000,00 |
| f. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Rp 30.000.000,00 |

Pasal 7

Indeks Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut:

- a. Indeks belanja makanan dan minuman:
 1. Bupati sebesar Rp10.000.000,00 per bulan;
 2. Wakil Bupati sebesar Rp8.000.000,00 per bulan.
- b. Indeks pengadaan pakaian dinas:
 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp6.500.000,00 setiap stel;
 2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 3. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp3.750.000,00 setiap stel;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 5. Pakaian KORPRI sebesar Rp1.500.000,00 setiap stel;
 6. Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp2.000.000,00 setiap stel;
 7. Pakaian Adat Daerah sebesar Rp7.000.000,00 setiap stel;
 8. Pakaian Olah Raga sebesar Rp1.000.000,00 setiap stel;
 9. Sepatu Olah Raga sebesar Rp1.000.000,00 setiap pasang; dan
 10. Kelengkapan pakaian dinas/atribut lainnya:
 - a) Peci Rp 100.000,00 setiap buah;
 - b) Ikat pinggang Rp 200.000,00 setiap buah;
 - c) Sepatu kerja Rp2.000.000,00 setiap pasang;
 - d) Jengkol harian Rp 345.000,00 setiap buah;
 - e) Lencana KORPRI Rp 50.000,00 setiap buah;
 - f) Papan nama Rp 60.000,00 setiap buah;
 - g) Tanda pangkat upacara Rp 435.000,00 setiap pasang; dan
 - h) Tanda pangkat harian Rp 385.000,00 setiap pasang.
- c. BBM Kendaraan Dinas diatur sebagai berikut:
 1. Bupati sebesar 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) liter setiap bulan; dan
 2. Wakil Bupati sebesar 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter setiap bulan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001